

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SEBAGAI
BAGIAN DARI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI
LINGKUNGAN PENDIDIKAN**

(Studi Kasus pada STIKES di Kota Semarang)

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana Strata 2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi hukum kesehatan



Disusun oleh :

Yana Agus Setianingsih, S.ST

NIM 11.93.0051

kepada

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2015

TESIS

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SEBAGAI BAGIAN DARI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

(Studi Kasus pada STIKES di Kota Semarang)

diajukan oleh
Yana Agus Setianingsih, S.ST
NIM 11.93.0051

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Endang Wahyati, SH. M.Hum.

Tanggal.....

Pembimbing Pendamping

Dr. Endang Widyorini, M.Si

Tanggal.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SEBAGAI BAGIAN DARI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN”**.

Sebagaimana diketahui kesehatan merupakan hak asasi yang seharusnya didapatkan oleh setiap manusia. Untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal bisa dilakukan dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang salah satunya adalah terbebas dari paparan asap rokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kenyataannya aktivitas merokok juga merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dilarang begitu saja. Untuk menyeimbangkan antara hak perokok dan hak manusia atas kesehatan, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Kawasan tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 dan 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranoto Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang
2. Dr. Ir. Lindayani, MP sebagai Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN. sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
4. Dr. Endang Wahyati, SH. M.Hum selaku pembimbing Utama yang telah memberi bimbingan dengan penuh kesabaran
5. Dr. Endang Widyorini, M.Si, selaku pembimbing Pendamping yang bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan.
6. Pimpinan STIKES di Kota Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian.
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih perlu penyempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Semarang, 23 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran	vi
Halaman Pernyataan.....	vii
Abstrak	viii
Abstract.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Konsep	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Penyajian Tesis.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Asasi	23
B. Hak Untuk Hidup Sehat	27
C. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).....	29
D. Kesehatan Lingkungan.....	33
E. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	34
F. Perguruan Tinggi.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	51
Gambaran Umum STIKES di Kota Semarang	51
B. Pembahasan.....	57
1. Kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai bagian PHBS.....	57
2. Pelaksanaan kebijakan tentang KTR di STIKES Kota Semarang.....	81
3. Faktor yuridis dan sosiologis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan KTR sebagai bagian dari PHBS di STIKES Kota Semarang.....	88
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Perijinan

Lampiran II SK STIKES Widya Husada tentang KTR

Lampiran III Hasil wawancara



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yana Agus Setianingsih, Peserta Program studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 11.93.0051.

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2015

Yana Agus Setianingsih

ABSTRAK

Kebijakan KTR adalah sesuatu yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak perokok dan hak atas kesehatan. Merokok merupakan hak asasi manusia dan memperoleh derajat kesehatan yang tinggi adalah hak setiap manusia. Kesehatan bisa terwujud dengan terbebas dari paparan asap rokok baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang memiliki tujuan sama dengan Kebijakan KTR yaitu untuk memperoleh derajat kesehatan yang maksimal. Salah satu kawasan yang harus bebas asap rokok adalah lingkungan pendidikan. Stikes merupakan pendidikan bidang kesehatan yang dapat menjadi ujung tombak terlaksananya kebijakan KTR sebagai bagian dari PHBS. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan KTR dan PHBS serta pelaksanaan di STIKES dan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis Aspek yuridis yang diteliti adalah ketentuan hukum tentang Kebijakan KTR dan PHBS. Aspek sosiologis yang diteliti yaitu pelaksanaan kebijakan KTR sebagai bagian dari PHBS di STIKES Kota Semarang

Kebijakan KTR diatur dalam berbagai ketentuan perundangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai Peraturan Daerah. Secara khusus kebijakan KTR di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 dan 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan tanpa rokok. Pelaksanaan kebijakan KTR di STIKES Kota Semarang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum adanya peraturan internal dan pelaksanaan kebijakan serta sanksi belum ditegakkan. Hal ini merupakan faktor yuridis yang menghambat terlaksananya kebijakan KTR. Faktor sosiologis yang mendukung kebijakan KTR adalah jumlah warga STIKES yang didominasi oleh perempuan, dan faktor yang menghambat adalah tingkat kesadaran yang rendah dari warga kampus maupun masyarakat sekitar kampus

Kata kunci : Kebijakan, KTR, PHBS, Lingkungan Pendidikan

ABSTRACT

KTR (Free Smoking Area) policy made by the Government aims to balance between the rights to smoke and the rights to get health. Smoking and obtaining a high degree of health is the right of every human being. Real Health is immune from tobacco smoke, either directly or indirectly. This is related to a clean and healthy living behaviors (PHBS) that goes along with KTR policy to obtain the maximum health status. One area that should be free from smoke is the educational environment. STIKES is the health education that can be the spearhead for the implementation of KTR policy as a part of PHBS. This study aims to determine the KTR policy and PHBS and the implementation in STIKES and to find out the supporting factors and the obstacles in the implementation of the policy.

The method used is the juridical sociology and research specification is analytic descriptive juridical aspects examined are legal provisions concerning with KTR policy and PHBS. Sociological aspects studied are the implementation of KTR policy as a part of PHBS in STIKES Semarang.

KTR policy is regulated in the various legislative provisions in the form of law, government regulation, ministry regulation to regional regulation. In particular KTR policy in Semarang is jointly stipulated by the Health Minister and the State Minister No. 188 and 7 in 2011 on the Guidelines of Smoking Area, The Regulation of Health Minister No. 40 in 2013 on the Road Map of Impact Control of Cigarette Consumption, Regional Regulation No. 3 in 2013 on free smoking area. The implementation of KTR policy in STIKES Semarang has been implemented based on statutory provisions, but it has not run optimally due to the lack of internal regulation and implementation of policies and sanctions have not been enforced. This is a juridical factors that hinder the implementation of KTR policy. Sociological factors which support the KTR policy are the number of STIKES students is dominated by women, and the hindrance factor is the low level of awareness of the campus and the community surrounding the campus.

Keywords: policy, KTR (Free Smoking Area), PHBS (clean and healthy living behaviors), Environmental Education